

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Efektivitas Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan cara pengumpulan data menggunakan *Library Research*. Teknik analisis pada skripsi menggunakan cara *Content Analysis*.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dapat merubah sistematika kerja yang berlaku pada KPK karena harus sesuai dengan peraturan ASN. Dan dampak yang dapat terlihat pada tubuh KPK adalah pelemahan yang terjadi oleh tubuh KPK karena adanya kode etik yang harus di terapkan oleh pegawai KPK dan diawasi oleh KemenPAR-RB dan BKN.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Pengalihan Status, Pegawai KPK, Pegawai ASN, PP No. 41 Tahun 2020

ABSTRACT

This study aims to test the Effectiveness of Transferring KPK Employees to ASN Employees based on Government Regulation no. 41 of 2020. This thesis is a type of normative juridical research. This study uses a problem approach, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The type of data used in this study uses secondary data by collecting data using the Research Library. The analysis technique in the thesis uses the Content Analysis method.

The results of this study indicate that changing the status of a KPK employee to an ASN employee can change the work systematics that apply to the KPK because it must comply with ASN regulations. And the impact that can be seen on the KPK body is the weakening that occurs by the KPK body because of a code of ethics that must be applied by KPK employees and supervised by KemenPAR-RB and BKN.

Keywords: *Corruption Eradication Commission, State Civil Apparatus, Status Transfer, KPK Employees, ASN Employees, PP No. 41 Year 2020*